



**BKAD  
LUTIM**

Rencana Kerja

**RENJA**  
**2026**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan penuh rasa syukur, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan karunia-Nya yang melimpah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2026 adalah sebuah langkah yang strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BKAD Kabupaten Luwu Timur, sebagai perangkat daerah penunjang pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, berkomitmen untuk menyusun Renja ini dengan cermat dan terencana. Analisis kebutuhan dan strategi yang dilakukan mengacu pada rencana pembangunan daerah, sehingga BKAD dapat memastikan bahwa prioritas dan strategi yang diusulkan dalam Renja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Kami berharap Renja BKAD tahun 2026 dapat menjadi panduan yang kokoh dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan Renja ini akan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Luwu Timur.

Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses penyusunan Renja ini, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam setiap langkah kita untuk kemajuan daerah ini.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Malili, 14 Juli 2025

KEPALA BKAD Kab. Luwu Timur



**Dr.H. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M., CWM**

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 197008142002121006

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	4
	1.1 Latar Belakang .....	4
	1.1 Landasan Hukum .....	5
	1.2 Maksud dan Tujuan .....	8
	1.3 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU .....	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD .....	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD.....	27
	2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	27
	2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci .....	29
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD .....	30
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .....	31
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. ....	35
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	36
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	36
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah .....	37
	3.3 Program dan Kegiatan .....	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 .....	41
BAB V	PENUTUP.....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

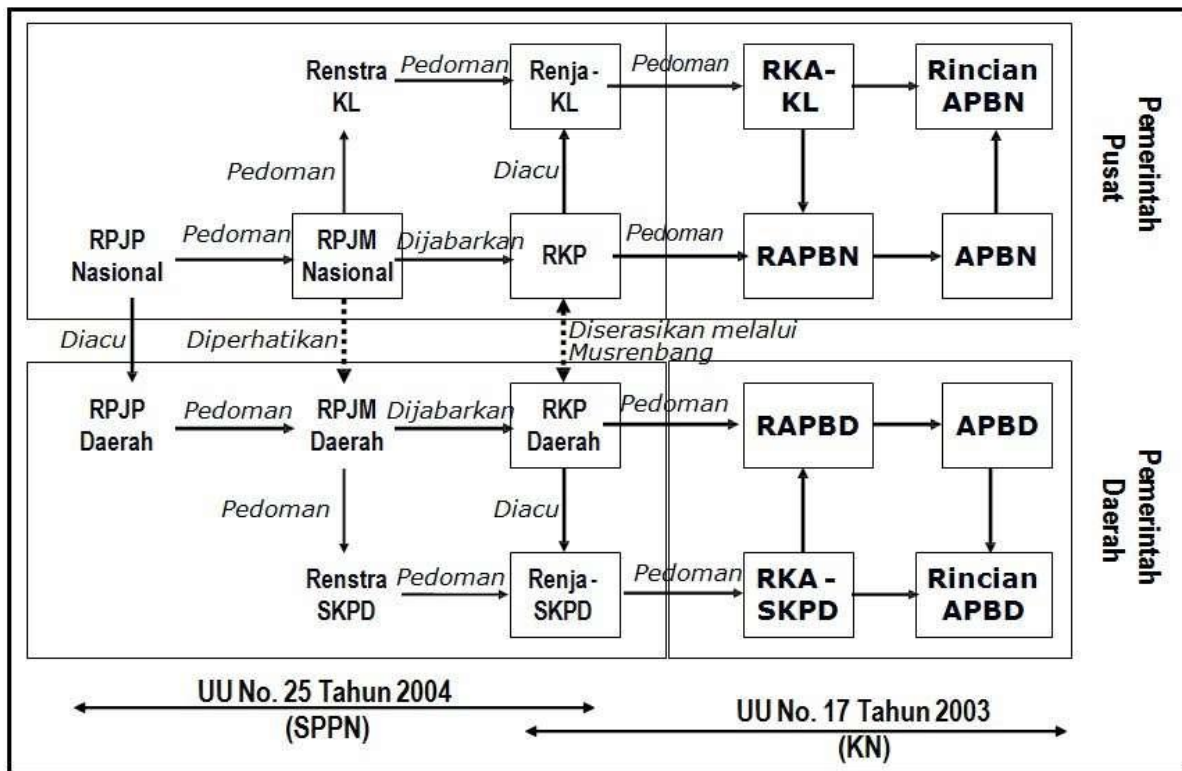
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur memiliki peran strategis dalam menjamin tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD Tahun 2026 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BKAD periode 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra, yang menjadi momentum krusial untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya dalam hal digitalisasi pengelolaan keuangan dan optimalisasi aset daerah.

Renja ini disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dokumen ini memuat kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja BKAD Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif, meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, hingga penetapan rancangan akhir. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD Tahun Anggaran 2026, guna memastikan sinergi antara perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hubungan Renja Perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1  
 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



### 1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

- Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168)
  19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 20).

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan sasaran, program, dan kegiatan prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2025-2029 ke dalam rencana operasional tahunan yang konkret dan terukur;
2. Menyediakan pedoman bagi seluruh aparatur BKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun Anggaran 2026;
3. Menerjemahkan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 ke dalam program kerja perangkat daerah;

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 sebagai landasan operasional unsur pimpinan dan staf dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun dengan kerangka sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan kebutuhan anggaran untuk menjamin kelancaran operasional dan pelayanan BKAD selama satu tahun;
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan;
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD Tahun Anggaran 2026 yang efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Menjadi tolak ukur dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur dan organisasi pada tahun 2026;

## 1.3 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 meliputi:

### BAB I PENDAHULUAN

*Bab ini memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja BKAD.*

1.1 Latar Belakang

*Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BKAD, rencana Kerja BKAD, keterkaitan antara Renja BKAD dengan Dokumen RKPD dan Renstra BKAD.*

1.2 Landasan Hukum

*Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BKAD Tahun 2026.*

1.3 Maksud dan Tujuan

*Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKAD.*

1.4 Sistematika Penulisan

*Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BKAD, serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB serta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.*

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKAD DAERAH TAHUN LALU**

*Bab ini menyajikan kajian evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKAD tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025). Bab ini memuat:*

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD.

*Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BKAD.*

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

*Menjelaskan dan menyajikan hasil analisis kinerja pelayanan BKAD serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut.*

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

*Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.*

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

*Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

*Bab ini merumuskan arah kebijakan BKAD untuk tahun 2026 yang selaras dengan Renstra dan RKPD. Bab ini memuat:*

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

*Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKAD.*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Tahun 2026

*Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.*

3.3 Program dan Kegiatan BKAD

*Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BKAD.*

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

*Bab ini menguraikan secara rinci rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, serta pagu indikatif pendanaan BKAD untuk Tahun Anggaran 2026.*

BAB V PENUTUP

*Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut untuk memastikan keberhasilan implementasi Renja BKAD Tahun 2026.*

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2024, secara umum kinerja BKAD menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja fisik dan realisasi keuangan yang memuaskan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan serta aset daerah

Secara akumulatif, realisasi anggaran BKAD pada tahun 2024 mencapai Rp 411.889.205.863,29 dengan rata-rata capaian kinerja fisik (keluaran) sebesar 99,94% dan rata-rata realisasi keuangan sebesar 95,40%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Rincian capaian kinerja per program urusan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada program ini, BKAD menargetkan indikator "Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar" sebesar 100%. Realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 96 (atau 96,28%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.882.452.614,34 atau 63,44% dari pagu anggaran. Meskipun realisasi keuangan berada pada kategori sedang, capaian kinerja fisik yang tinggi menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang signifikan, terutama pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta administrasi umum perangkat daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini merupakan inti dari tugas fungsi BKAD dengan indikator "Persentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Capaian kinerja pada program ini sangat memuaskan dengan realisasi fisik mencapai 106% (melampaui target) dan realisasi keuangan sebesar Rp 361.780.443.432,69 atau 99,53%. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja optimal pada kegiatan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, serta

akuntansi dan pelaporan keuangan yang berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada program pengelolaan aset, indikator "Persentase Barang Milik Daerah Yang Terkelola Dengan Baik" ditargetkan sebesar 91%. Realisasi kinerja fisik berhasil melampaui target mencapai 101,10%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.275.092.573 atau 97,04%. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola aset, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pengamanan dan pemindahtanganan barang milik daerah, telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap 3 (tiga) program utama yang dilaksanakan oleh BKAD pada tahun 2024 mendapatkan predikat kinerja Sangat Tinggi. Hasil evaluasi ini menjadi modal penting dan landasan dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun selanjutnya guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Luwu Timur.

Rincian lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BKAD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
									I		II		III		IV					
									7		8		9		10					
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Semua Bidang</b>																				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	96,50	247.304.322.267	95,00	-	100	47.104.451.361	24	4.927.038.736	23,34	7.876.736.046	25	6.053.649.050	25	11.025.028.782	96	29.882.452.614,34	96,28	63,44
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	200,00	660.599.000	100,00	-	100	185.190.450	25	6.471.500	25	32.808.000	25	42.130.030	25	83.825.694	100	165.235.224	100,00	89,22
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	5,00	309.167.000	1,00	-	2	85.763.850	-	6.471.500	1	14.903.000	1	19.318.430	-	32.285.265	2	72.978.195	100,00	85,09

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	21.627.000	0,00	-	2	3.699.400	-	-	-	-	1	579.720	1	2.841.000	2	3.420.720	100,00%	92,47%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	21.600.000	0,00	-	2	3.037.150	1	-	-	-	-	-	1	2.940.200	2	2.940.200	100,00%	96,81%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20,00	308.205.000	0,00	-	10	92.690.050	4	-	2	17.905.000	2	22.231.880	2	45.759.229	10	85.896.109	100,00%	92,67%
<b>Administrasi Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	196,00	236.727.772.067	0,00	-	100	43.674.208.811	25	4.749.600.303	25	7.413.387.925	25	5.010.608.968	25	9.920.934.341	100	27.094.531.537	100,00%	62,04%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		234.309.925.067	0,00	-	30	43.216.368.811	30	4.660.762.003	30	7.325.891.425	30	4.939.075.468	32	9.747.286.886	30	26.673.015.782	100,00%	61,72%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8,00	759.200.000	0,00	-	4	105.970.000	1	-	1	38.485.500	1	16.362.500	1	50.234.500	4	105.082.500	100,00%	99,16%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2,00	382.642.000	0,00	-	1	84.260.000	1	51.460.800	-	-	-	-	-	-	1	51.460.800	100,00%	61,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	38,00	1.276.005.000	0,00	-	18	267.610.000	4	37.377.500	5	49.011.000	4	55.171.000	5	123.412.955	18	264.972.455	100,00%	99,01%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu (%)	196,00	94.790.000	0,00	-	100	17.090.000	25	-	25	8.724.000	25	4.912.000	25	3.400.000	100	17.036.000	100,00%	99,68%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		94.790.000	0,00	-	4	17.090.000	1	-	1	8.724.000	1	4.912.000	1	3.400.000	4	17.036.000	100,00%	99,68%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	190,00	2.602.640.500	0,00	-	100	714.317.400	30	7.253.500	25	210.660.064	15	285.883.451	16	56.890.818	86	560.687.833	86,00%	78,49%

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4,00	492.330.000	0,00	-	2	60.222.000	-	2.000.000	1	20.104.500	-	15.422.500	1	15.080.000	2	52.607.000	100,00%	87,36%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	900,00	348.200.500	0,00	-	700	52.125.400	-	-	-	-	375	31.495.000	-	3.508.500	375	35.003.500	53,57%	67,15%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	93,00	1.762.110.000	0,00	-	60	601.970.000	6	5.253.500	30	190.555.564	3	238.965.951	10	38.302.318	49	473.077.333	81,67%	78,59%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	190,00	4.460.485.200	0,00	-	100	795.326.200	25	128.173.820	24,2	94.108.920	25	236.755.406	25	271.260.733	99	730.298.879	99,20%	91,82%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20,00	86.195.000	0,00	-	4	6.950.000	1	1.700.000	1	1.850.000	1	1.700.000	1	1.700.000	4	6.950.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	55.559.000	0,00	-	4	13.660.000	1	2.850.000	1	2.850.000	1	2.850.000	1	3.110.000	4	11.660.000	100,00%	85,36%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6,00	248.000.000	0,00	-	5	31.575.000	1	-	1	6.725.000	1	2.375.000	2	21.820.000	5	30.920.000	100,00%	97,93%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	288,00	79.920.000	0,00	-	144	25.080.000	28	1.920.000	36	2.410.000	36	6.160.000	36	9.800.000	136	20.290.000	94,44%	80,90%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4,00	302.450.000	0,00	-	2	59.950.000	1	11.500.000	-	4.600.000	1	18.850.000	-	25.000.000	2	59.950.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500,00	3.688.361.200	0,00	-	175	658.111.200	31	110.203.820	42	75.673.920	50	204.820.406	50	209.830.733	173	600.528.879	98,86%	91,25%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	200,00	1.811.125.500	0,00	-	100	237.688.500	25	35.539.613	25	68.643.765	25	26.456.032	25	79.364.672	100	210.004.082	100,00%	88,35%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8,00	413.325.500	0,00	-	4	90.688.500	1	4.705.600	1	40.850.400	1	-	1	41.343.500	4	86.899.500	100,00%	95,82%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24,00	1.105.000.000	0,00	-	12	106.200.000	3	22.284.013	3	19.343.365	3	17.456.032	3	23.221.172	12	82.304.582	100,00%	77,50%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24,00	292.800.00	0,00	-	12	40.800.000	3	8.550.00	3	8.450.00	3	9.000.00	3	14.800.000	12	40.800.000	100,00%	100,00%		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	190,00	946.910.00	0,00	-	100	1.480.630.00	12,5	-	12,5	48.403.372	22,81	446.903.163	25	609.352.525	73	1.104.659.060,34	72,81%	74,61%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	38,00	266.820.00	0,00	-	10	358.500.000	3	-	5	19.432.372	10	19.204.828	2	87.414.015	10	126.051.215	100,00%	35,16%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		346.890.00	0,00	-	55	56.130.000	-	-	-	-	14	16.190.000	7	22.110.000	21	38.300.000	38,18%	68,23%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2,00	333.200.00	0,00	-	1	1.066.000.00	-	-	-	28.971.000	1	411.508.335,34	-	499.828.510	1	940.307.845,34	100,00%	88,21%		
																		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	99,62%	63,44%	
																			<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Rendah
<b>KEUANGAN</b>																					

<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	92,00	1.736.170.942.464	10,00	-	92	363.470.764.962	-	11.325.221.497	-	75.623.884.718	-	75.623.884.718	97,52	198.571.415.559	106%	<b>361.780.443.432,69</b>	1,15%	99,53%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Waktu penyusunan Rancangan APBD Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	20,00	8.017.201.909	0,00	-	11	1.730.749.400	-	103.842.500	-	200.401.696	-	577.346.040	11	678.086.616	11	1.559.676.852	100,00%	90,12%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	4,00	529.449.644	0,00	-	2	98.349.300	-	-	-	11.420.000	2	69.378.660	-	13.600.000	2	94.398.660	100,00%	95,98%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	4,00	486.174.740	0,00	-	2	90.474.400	-	-	-	12.900.000	2	59.130.680	-	15.895.000	2	87.925.680	100,00%	97,18%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	118,00	126.326.600	0,00	-	59	12.326.450	-	-	-	-	59	9.490.540	-	2.400.000	59	11.890.540	100,00%	96,46%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	118,00	112.524.606	0,00	-	59	16.622.650	59	5.600.000	-	8.091.500	-	-	-	-	59	13.691.500	100,00%	82,37%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	118,00	107.324.606	0,00	-	71	18.122.000	-	-	11	-	2	12.579.400	59	5.000.000	72	17.579.400	101,41%	97,01%

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	4,00	2.720.921.420	0,00	-	2	833.831.050	-	52.895.000	-	38.454.200	-	147.835.300	2	490.950.100	2	730.134.600	100,00%	87,56%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	4,00	2.800.646.911	0,00	-	5	498.382.000	-	13.165.000	1	113.736.306	2	238.426.350	2	102.191.246	5	467.518.902	100,00%	93,81%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	30,00	400.261.602	0,00	-	25	85.231.750	15	23.452.500	5	5.725.000	3	14.232.050	2	25.788.080	25	69.197.630	100,00%	81,19%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	8,00	602.347.208	0,00	-	4	57.185.800	1	5.250.000	1	8.100.000	1	20.187.190	1	14.093.330	4	47.630.520	100,00%	83,29%
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	471,00	131.224.572	0,00	-	236	20.224.000	59	3.480.000	59	1.974.690	59	6.085.870	59	8.168.860	236	19.709.420	100,00%	97,46%

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan (Persen)	19 4,0 0	1.530.597 .200	0,0 0	-	1 0 0	799.873.750	2 5	64.006. 500	25	137.774 .000	25	198.870 .080	25	349.602.125	10 0	750.252.70 5	100, 00%	93,8 0%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	24, 00	378.462.2 00	0,0 0	-	1 2	187.844.950	3	23.035. 000	3	69.469. 500	3	27.511. 020	3	62.693.600	12	182.709.12 0	100, 00%	97,2 7%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	24, 00	819.462.0 00	0,0 0	-	1 2	460.876.800	3	40.971. 500	3	68.304. 500	3	153.564 .560	3	171.043.025	12	433.883.58 5	100, 00%	94,1 4%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	48 0,0 0	332.673.0 00	0,0 0	-	2 4 0	151.152.000	6 0	-	60	-	60	17.794. 500	60	115.865.500	24 0	133.660.00 0	100, 00%	88,4 3%

	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Terkoordinasi dan Terlaksana (Persen)	19 4,0 0	5.723.313 .905	0,0 0	-	9 7	1.646.599.2 00	9 5	321.203 .000	95	350.474 .600	84	281.914 .921	10 0	529.164.790	94	1.488.757.4 11	96,5 0%	90,4 1%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	24, 00	424.736.0 00	0,0 0	-	1 2	130.881.000	3	2.000.0 00	3	30.699. 500	3	28.096. 171	3	68.417.865	12	129.213.53 6	100, 00%	98,7 3%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	47 2,0 0	260.126.0 00	0,0 0	-	2 3 6	70.315.000	5 9	6.000.0 00	59	34.031. 500	59	8.463.0 00	59	20.459.000	23 6	68.953.500	100, 00%	98,0 6%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	36, 00	929.775.2 95	0,0 0	-	1 8	393.649.700	4	2.000.0 00	5	34.982. 500	4	112.555 .000	5	169.443.270	18	318.980.77 0	100, 00%	81,0 3%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	36, 00	630.428.2 00	0,0 0	-	1 8	192.005.000	5	49.927. 000	5	36.907. 700	4	16.162. 500	4	78.922.500	18	181.919.70 0	100, 00%	94,7 5%

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4,00	2.384.731.580	0,00	-	2	529.744.000	-	191.045.500	1	191.639.500	1	58.545.500	-	74.306.010	2	515.536.510	100,00%	97,32%
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2,00	182.545.105	0,00	-	1	29.599.750	-	-	-	22.292.000	-	3.844.750	1	2.020.000	1	28.156.750	100,00%	95,12%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	4,00	182.780.525	0,00	-	2	81.194.750	-	-	-	-	1	17.173.000	-	38.554.750	1	55.727.750	50,00%	68,63%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	640,00	728.191.200	0,00	-	320	219.210.000	120	70.230.500	-	5.922.000	140	37.075.000	-	77.041.395	260	190.268.895	81,25%	86,80%

	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat (Persen)	19 0,0 0	1.720.899 .829.450	0,0 0	-	1 0 0	359.293.542 .612,29	-	10.836. 169.497	10 0	74.935. 234.222	10 0	75.195. 790.618	10 0	197.014.562 .028	75	357.981.75 6.464,69	75,0 0%	99,6 3%				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	6,0 0	1.719.149 .829.450	0,0 0	-	3	357.793.542 .612,29	-	10.836. 169.497	1	74.798. 734.322	1	75.127. 790.618	1	196.601.062 .027,69	3	357.363.75 6.464,69	100, 00%	99,8 8%				
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	6,0 0	1.750.000 .000	0,0 0	-	1	1.500.000.0 00	-	-	-	136.500 .000	-	68.000. 000	1	413.500.000	1	618.000.00 0	100, 00%	41,2 0%				
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,9 8%	99,5 3%		
																						Predikat Kinerja	San gat Ting gi	San gat Ting gi
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terkelola Dengan Baik (Persen)	95, 00	3.480.788 .206	90, 00	-	9 1	1.313.989.5 40	1 7	94.640. 750	25	274.914 .386	25	237.078 .673	25	1.249.870.2 00	92	1.275.092.5 73	101, 10%	97,0 4%				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah Yang Tertata Dengan Baik (Perangkat Daerah)	11 6,0 0	3.480.788 .206	0,0 0	-	5 9	1.313.989.5 40	1 0	94.640. 750	15	274.914 .386	15	237.078 .673	19	668.418.864	59	1.275.092.5 73	100, 00%	97,0 4%				
	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	4,0 0	195.297.0 00	0,0 0	-	2	35.196.900	1	-	-	2.733.0 00	-	19.922. 620	1	11.350.250	2	34.005.870	100, 00%	96,6 2%				

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4,0 0	170.593.0 15	0,0 0	-	2	30.682.700	-	-	1	14.095.000	-	10.848.040	1	2.110.000	2	27.053.040	100,00%	88,17%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2,0 0	496.068.8 76	0,0 0	-	1	187.211.980	-	30.600.000	1	48.609.900	-	20.995.000	-	68.767.889	1	168.972.789	100,00%	90,26%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	2,0 0	177.853.1 20	0,0 0	-	1	31.951.960	-	-	-	17.220.000	-	-	1	13.414.360	1	30.634.360	100,00%	95,88%
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengamanan barang milik daerah (dokumen)		251.856.3 80	0,0 0	-	2	76.490.050	-	3.000.000	1	9.077.000	-	4.200.000	1	59.511.190	2	75.788.190	100,00%	99,08%
Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	4,0 0	412.375.3 90	0,0 0	-	2	195.513.650	1	38.514.650	-	6.480.000	1	-	-	141.258.940	2	186.253.590	100,00%	95,26%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	8,0 0	402.766.0 00	0,0 0	-	4	436.339.500	1	2.000.000	1	89.780.576	1	98.216.963	1	245.789.867	4	435.787.406	100,00%	99,87%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2,0 0	168.423.9 75	0,0 0	-	1 1 8	31.023.800	5 9	-	-	-	59	10.813.900	-	18.913.740	11 8	29.727.640	100,00%	95,82%

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2,0 0	168.159.4 50	0,0 0	-	1	29.859.250	-	-	1	8.589.1 10	-	-	-	20.335.100	1	28.924.210	100, 00%	96,8 7%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	23 6,0 0	1.037.395 .000	0,0 0	-	1 1 8	259.719.750	5 9	20.526. 100	59	78.369. 800	-	72.082. 050	-	86.967.528	11 8	257.945.47 8	100, 00%	99,3 2%
								5 9	20.526. 100	-						59	20.526.100	100, 00%	97,0 4%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD.

Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2021-2026. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai keberhasilan BKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di masa mendatang.

Analisis ini mencakup dua aspek utama, yaitu pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### 2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD berfokus pada ketepatan waktu dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan kualitas koordinasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan evaluasi tahun 2020-2024, capaian IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persetujuan Bersama Ranperda dan Ranperbup APBD Tepat Waktu Kinerja pada indikator ini menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2020, waktu persetujuan membutuhkan 77 hari (di atas target 60 hari). Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, BKAD berhasil melakukan percepatan proses dengan realisasi yang konsisten di bawah target 60 hari, yaitu 54 hari (2021), 53 hari (2022-2023), dan 57 hari pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan semakin efektifnya koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dimotori oleh BKAD.
2. Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Indikator ini mengukur kepatuhan penyampaian laporan keuangan unaudited kepada BPK. Secara umum kinerja cukup baik dengan capaian 75 hari pada periode 2021-2023 (di bawah batas 80 hari). Namun, pada tahun 2024 tercatat sedikit pelampauan waktu menjadi 82 hari. Hal ini menjadi catatan evaluasi penting bagi BKAD untuk memperketat proses rekonsiliasi aset dan keuangan di tingkat SKPD agar keterlambatan tidak berulang di tahun mendatang

Tabel 2.2  
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu	Hari	60	77	54	53	53	57	<b>Tercapai</b> (Realisasi di bawah target 60 hari sejak 2021)
2	Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu	Hari	80	80	75	75	75	82	Tahun 2024 terdapat revisi jadwal dari BPK RI sehingga pemda harus menyesuaikan

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu menunjukkan perbaikan tren yang sangat positif. Setelah sempat melampaui target pada tahun 2020 (77 hari), BKAD berhasil melakukan percepatan signifikan di tahun-tahun berikutnya, konsisten berada di kisaran 53-57 hari (di bawah batas maksimal 60 hari). Ini menunjukkan efektivitas koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kinerja Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sangat baik dengan capaian 75 hari pada periode 2021-2023. Namun, untuk tahun 2024 dimana realisasi mencapai 82 hari (sedikit di atas target 80 hari), hal ini dikarenakan terdapat revisi jadwal dari BPK RI karena padatnya jadwal sehingga BKAD harus menyesuaikan dengan lowong waktu BPK RI dalam menerima LKPD.

Mengingat Bab II merupakan evaluasi kinerja periode sebelumnya, maka indikator kinerja yang disajikan dalam analisis ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Renstra BKAD Tahun 2021-2026. Adapun penyesuaian dengan IKU Renstra Baru (2025-2029) akan dijabarkan mulai pada Bab III dokumen ini

## 2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesehatan fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data realisasi tahun 2021-2024, analisis kinerja BKAD adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah Capaian realisasi persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan menunjukkan fluktuasi. Dari 92,6% pada tahun 2021, angka ini bergerak dinamis dan berakhir pada 80,37% di tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada dana transfer masih cukup tinggi dan intensifikasi potensi PAD perlu menjadi fokus strategi di tahun mendatang.
2. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BKAD berhasil mempertahankan kualitas pelaporan keuangan dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara konsisten hingga tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa fundamental tata kelola keuangan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah berjalan sangat baik.
3. Efisiensi Anggaran (SILPA) Indikator persentase SILPA menunjukkan volatilitas yang signifikan. Setelah sempat berada di angka negatif pada 2021-2022, capaian membaik menjadi positif 40% pada tahun 2024. Dinamika ini menyoroti tantangan dalam akurasi perencanaan anggaran dengan realisasi belanja, yang dapat disebabkan oleh penyerapan yang belum maksimal atau efisiensi belanja yang tidak terencana.
4. Pemenuhan Mandatory Spending Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui BKAD menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar.
  - Belanja Pendidikan: Terealisasi sebesar 110% pada tahun 2024, melampaui batas minimal 20%.
  - Belanja Kesehatan: Terealisasi sangat tinggi sebesar 193,06% pada tahun 2024, jauh di atas batas minimal 10%.
5. Realisasi Program Indikator "Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana" konsisten berada di angka 0%. Ini menunjukkan bahwa seluruh program yang telah dianggarkan berhasil dieksekusi oleh BKAD sesuai rencana.

Rincian data capaian IKK disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Indikator Kinerja Kunci 2021-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024	KET
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	92,6	85,23	92,81	80,37	
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase SILPA	%	-53	-147	12	40	
4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	-179	-321	-82	-40	
5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0	0	
6	Persentase Belanja Pendidikan (Min 20%)	%	119	108	111	110	
7	Persentase Belanja Kesehatan (Min 10%)	%	210	192	184	193,06	
8	Penetapan APBD Tepat Waktu	%	100	100	100	100	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur memegang peran strategis dalam menjamin tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan dinamika lingkungan strategis yang tertuang dalam Renstra BKAD 2025-2029, terdapat 3 (tiga) isu strategis utama yang menjadi fokus penanganan pada Rencana Kerja tahun 2026, yaitu:

1. Belum Maksimalnya Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Isu ini merujuk pada tantangan dalam proses penyusunan APBD yang seringkali menghadapi kendala koordinasi antar-OPD, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD RI, keterbatasan SDM perencana, serta dinamika kebijakan anggaran pusat yang sering berubah. Kondisi ini berpotensi menghambat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
  - Penanganan 2026: Penguatan sinergi perencanaan TAPD, peningkatan kapasitas aparatur perencana, dan optimalisasi sistem informasi perencanaan anggaran.
2. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pemanfaatan Aset Daerah Masih terdapat kendala dalam pemutakhiran data aset (inventarisasi) yang belum maksimal, pengelolaan aset di tingkat SKPD yang belum tertib, serta kompetensi pengurus barang yang perlu ditingkatkan. Hal ini menyebabkan aset daerah belum dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Penanganan 2026: Modernisasi sistem inventarisasi aset, peningkatan pembinaan/bimtek kepada pengurus barang di SKPD, serta pemetaan potensi aset produktif.
3. Keterlambatan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Isu ini berakar dari proses konsolidasi laporan keuangan dari seluruh SKPD yang terkadang belum optimal dan standar penatausahaan keuangan yang belum seragam di seluruh entitas. Keterlambatan ini berisiko mempengaruhi opini BPK dan akuntabilitas publik.
- Fokus Penanganan 2026: Penguatan sistem akuntansi dan pelaporan terintegrasi, percepatan proses rekonsiliasi bulanan, serta pendampingan intensif penyusunan laporan keuangan SKPD.

Ketiga isu strategis di atas menjadi landasan utama dalam perumusan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas BKAD Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2026.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD dengan usulan kebutuhan program dan kegiatan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Proses review ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prioritas pembangunan bidang keuangan dan aset yang tertuang dalam Renstra BKAD Tahun 2025-2029 telah terakomodir, serta menyesuaikan kebutuhan pendanaan dengan dinamika kebijakan terkini, khususnya terkait pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) seperti Gaji ASN dan Bantuan Keuangan.

Berdasarkan hasil telaahan, terdapat penyesuaian pagu anggaran pada beberapa program strategis sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Terdapat kenaikan signifikan pada usulan kebutuhan (Renja) dibandingkan proyeksi awal Renstra/RKPD. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian alokasi Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harus diakomodir secara penuh dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah: Kenaikan pagu pada program ini didominasi oleh alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat *specific grant* dan dana transfer desa yang dikelola secara administratif melalui BKAD selaku SKPKD.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah: Pagu anggaran disesuaikan dengan target prioritas penyelesaian sertifikasi aset dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Rincian perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Renja BKAD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Luwu Timur

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU RANCANGAN AWAL RKPD (Rp)	PAGU HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA (Rp)	SELISIH/ KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>179.933.790.261</b>	<b>263.730.792.621</b>	<b>(Bertambah karena penyesuaian Gaji ASN)</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.991.500	180.991.500	Tetap
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Termasuk Gaji dan Tunjangan ASN)	177.808.271.111	261.119.941.921	Bertambah
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.090.000	17.090.000	Tetap
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	551.534.650	551.534.650	Tetap
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.971.000	543.971.000	Tetap
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.900.000	581.900.000	Bertambah
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.242.000	227.242.000	Tetap
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.790.000	122.790.000	Tetap
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>399.081.589.029</b>	<b>399.081.589.029</b>	<b>Tetap</b>
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.662.266.550	1.662.266.550	Tetap
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	548.372.500	548.372.500	Tetap
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.270.974.250	1.270.974.250	Tetap

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU RANCANGAN AWAL RKPD (Rp)	PAGU HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA (Rp)	SELISIH/ KETERANGAN
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan)	395.599.975.729	395.599.975.729	Tetap
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>645.786.825</b>	<b>645.786.825</b>	<b>Tetap</b>
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	645.786.825	645.786.825	Tetap
	<b>TOTAL</b>	<b>579.661.166.115</b>	<b>663.458.168</b>	<b>Bertambah</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur mengemban fungsi utama sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan (supporting system) yang berfokus pada tata kelola keuangan dan aset daerah. Meskipun tugas dan fungsinya lebih banyak bersifat internal administratif dan koordinatif antar-Perangkat Daerah, BKAD tetap memiliki komitmen tinggi dalam merespons aspirasi masyarakat.

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme perencanaan partisipatif (Musrenbang) dan pokok pikiran (Pokir) DPRD yang diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks ini, peran BKAD meliputi:

1. **Verifikasi Kemampuan Keuangan Daerah:** BKAD selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan analisis terhadap proyeksi pendapatan dan belanja untuk memastikan usulan prioritas masyarakat dapat terdananai dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. **Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan/ Hibah/ Bansos:** BKAD menelaah usulan masyarakat terkait bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial (Bansos) untuk memastikan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Layanan Pemanfaatan Aset Daerah:** BKAD menindaklanjuti usulan atau permohonan masyarakat terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), seperti pinjam pakai atau sewa aset, guna optimalisasi aset yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun tidak memberikan layanan publik secara langsung (direct services) seperti sektor pendidikan atau kesehatan, BKAD memastikan bahwa setiap usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan daerah mendapatkan dukungan pendanaan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 menyelaraskan diri dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan turunan tahun kedua dari RPJMN 2025-2029 yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan ekonomi dan transformasi pelayanan publik.

Dalam mendukung prioritas nasional tersebut, khususnya terkait kemandirian fiskal dan efisiensi belanja negara/daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis sebagai *enabler* (pendukung utama) melalui penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel dan berbasis digital.

Penyelarasan kebijakan nasional tersebut diimplementasikan BKAD melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Dukungan Fiskal untuk Program Prioritas Nasional:** BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjamin ketersediaan alokasi anggaran yang memadai untuk program-program mandatori nasional, seperti dukungan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta program strategis nasional lainnya yang dibebankan kepada daerah, dengan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.
2. **Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan (Elektronifikasi):** Sejalan dengan kebijakan nasional percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), BKAD berkomitmen menerapkan digitalisasi penuh pada siklus pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan, guna menjamin transparansi dan kecepatan realisasi anggaran.
3. **Optimalisasi Aset untuk Kemandirian Daerah:** Merespons kebijakan nasional untuk meningkatkan kemandirian fiskal, BKAD fokus pada transformasi paradigma pengelolaan

Barang Milik Daerah (BMD) dari sekadar administrasi (asset administration) menjadi manajemen aset produktif (asset management). Inventarisasi dan legalisasi aset dipercepat untuk memetakan potensi aset yang dapat didayagunakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, sehingga ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Dengan strategi tersebut, Renja BKAD Tahun 2026 disusun untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur, selaras dengan visi pembangunan nasional.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) BKAD Tahun 2026 dirumuskan sebagai operasionalisasi tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) BKAD 2025-2029. Rumusan ini disusun untuk menjawab isu-isu strategis pengelolaan keuangan daerah serta mendukung pencapaian Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Luwu Timur, yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih Melalui Transformasi Digital".

Tujuan Renja BKAD 2026: "Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel." Untuk mencapai tujuan tersebut, BKAD menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan indikator kinerja yang terukur sebagai berikut::

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2026
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
			2. Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2026
			3. Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan	100%
			4. Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi	100%
			5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%
		2. Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	71 (Predikat BB)

(Sumber Data: Diolah dari Tabel 3.3 Renstra BKAD 2025-2029)

Penjelasan Target Kinerja Tahun 2026:

1. Opini WTP: BKAD menargetkan untuk mempertahankan opini WTP melalui penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Ketepatan Waktu: Target 100% pada penetapan APBD dan penyampaian LKPD mencerminkan komitmen BKAD terhadap siklus anggaran yang disiplin dan patuh jadwal.
3. Tindak Lanjut Aset: Target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terkait aset dipatok sebesar 90%, meningkat dari target tahun sebelumnya, yang menandakan keseriusan dalam membenahan tata kelola Barang Milik Daerah.
4. Akuntabilitas Kinerja (SAKIP): Nilai AKIP ditargetkan mencapai 71 (kategori BB), yang menunjukkan upaya BKAD dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi secara internal.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BKAD 2025-2029. Struktur program ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2026, BKAD akan melaksanakan 3 (tiga) Program dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal dan dukungan administrasi perkantoran guna menjamin kelancaran operasional perangkat daerah.
  - Kegiatan:
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (termasuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN).
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
    4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini merupakan inti dari tugas dan fungsi BKAD (*core business*) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
  - Kegiatan:
    1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (mencakup KUA-PPAS, RKA, dan Perda APBD).
    2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (mencakup Pengelolaan Kas, SPD, dan SP2D).
    3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (mencakup Laporan Keuangan Pemda/LKPD).
    4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (mencakup

Bantuan Keuangan dan Dana Darurat).

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini difokuskan pada peningkatan tata kelola aset daerah agar lebih tertib, akuntabel, dan produktif dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - Kegiatan:
    1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (mencakup Perencanaan Kebutuhan, Penatausahaan, Penilaian, hingga Penghapusan Aset).

## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Dokumen ini menjabarkan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang dilengkapi dengan indikator kinerja terukur serta kebutuhan pendanaan indikatif.

Total kebutuhan anggaran BKAD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp579.661.166.115,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur. Alokasi ini difokuskan pada tiga program utama, yaitu penunjang urusan pemerintah daerah (termasuk belanja pegawai/gaji ASN), pengelolaan keuangan daerah (termasuk bantuan keuangan), dan pengelolaan barang milik daerah.

Rincian rekapitulasi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/ OUTCOME)	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</b>	<b>96%</b>	<b>263.730.792.621</b>
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	180.991.500
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	96%	261.119.941.921
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Teradministrasi	100%	17.090.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/ OUTCOME)	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	100%	551.534.650
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	543.971.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang Dengan Rencana Kebutuhan	100%	581.900.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan	100%	227.242.000
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>90,5%</b>	<b>399.081.589.029</b>
		<b>PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD</b>	<b>34,46%</b>	
		<b>PERSENTASE ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>38,79%</b>	
		<b>PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>90,5%</b>	
		<b>PERSENTASE PENURUNAN SILPA</b>	<b>75%</b>	
		<b>PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN SKPD TEPAT WAKTU</b>	<b>100%</b>	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan anggaran (%)	100%	<b>1.662.266.550</b>
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penerbitan SP2D (%)	96%	548.372.500
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.	100%	1.270.974.250
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan	100%	395.599.975.729

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/ OUTCOME)	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat (%).		
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Penambahan nilai Aset tetap</b>	9%	645.786.825
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Perangkat Daerah Yang Terkelola	87%	645.786.825
<b>TOTAL</b>				<b>663.458.168.475</b>

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 disusun sebagai pedoman operasional yang menjabarkan strategi organisasi dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi seluruh jajaran BKAD dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja secara terukur dan akuntabel.

Keberhasilan implementasi Renja ini menuntut optimalisasi sumber daya organisasi, penerapan prinsip transparansi, serta sinergi yang solid baik di internal BKAD maupun dengan seluruh Perangkat Daerah. Keterpaduan langkah ini menjadi kunci mutlak untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjaga stabilitas fiskal, dan memastikan setiap kendala dapat diidentifikasi serta ditangani sejak dini demi kualitas tata kelola keuangan daerah yang prima.

Akhirnya, komitmen dan integritas seluruh aparatur BKAD Kabupaten Luwu Timur merupakan faktor penentu utama keberhasilan rencana ini. Dengan semangat kerja keras dan profesionalisme, diharapkan seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.